

## Determinan ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera

Selamet Rahmadi; Rida Setia Devi Siregar\*; Rosmeli

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

\*E-mail korespondensi : Risides0606@gmail.com

### Abstract

*This research aims to determine and analyze the dynamics of the development of income inequality as well as the influence of GRDP, population, inflation, HDI, and IP-ICT on income inequality in provinces on the island of Sumatra in 2018–2022. To answer this objective, a descriptive model was used: panel data regression analysis using a random effect model for the period 2018–2022 and 10 provinces on the island of Sumatra. The research results show that the development of income inequality in each province on the island of Sumatra fluctuates except for the Bangka Belitung Islands, which continues to decline during the research year period. The GRDP variable has a positive and significant effect on income inequality; the population variable has a positive and insignificant effect on income inequality; the inflation variable and the human development index have a negative and insignificant effect on income inequality; and the information and communication technology development index variable has a negative and significant effect on income inequality in Sumatra.*

**Keywords:** income inequality, GRDP, population, inflation, human development index

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dinamika perkembangan ketimpangan pendapatan serta pengaruh PDRB, populasi, inflasi, IPM dan IP-TIK terhadap ketimpangan pendapatan pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2022. Dalam menjawab tujuan tersebut digunakan model analisis deskriptif dan regresi data panel menggunakan random effect model dengan periode Tahun 2018-2022 dan 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ketimpangan pendapatan di setiap provinsi di Pulau Sumatera berfluktuatif kecuali Kepulauan Bangka Belitung yang terus mengalami penurunan selama periode tahun penelitian. variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, variabel populasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, variabel inflasi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan serta variabel indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera.

**Kata kunci:** ketimpangan pendapatan, produk domestik regional bruto, populasi, inflasi, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan teknologi informasi komunikasi

### PENDAHULUAN

Pendapatan adalah salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi seseorang atau suatu negara. Ketersediaan pendapatan yang

memadai dapat meningkatkan kemampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, pendapatan juga mempengaruhi kemampuan konsumsi dan tabungan, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pendapatan juga akan menentukan bagaimana tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah (Riandi et al., 2020).

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang positif dan juga keberhasilan pembangunan, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menjadi masalah yang ada di tengah masyarakat (World Bank, 2016). Pertumbuhan ekonomi di awal pembangunan hanya didukung oleh kelompok masyarakat dengan modal memadai, hal ini merupakan hambatan struktural yang sering kali dijumpai sehingga ketimpangan pun sulit dihindari (SMERU, 2019).

Ketimpangan, pemerataan, dan infrastruktur sebenarnya telah dikenal cukup lama di Indonesia, misalnya melatar belakangi program padat karya berbagai pembangunan infrastruktur, berbagai program jaring pengaman sosial; pembangunan jaringan infrastruktur di pedesaan, seperti jalan, irigasi, listrik, telepon, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi atau pendapatan. Ketimpangan pembangunan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan per kapita, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan atau antar wilayah. Ketimpangan timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan ketimpangan antara wilayah satu dengan lainnya (Yeniwati, 2013).

Ketimpangan atau kesenjangan antar daerah merupakan keadaan yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya terjadi akibat adanya perbedaan terhadap sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini yang membuat suatu daerah biasanya terdapat wilayah relatif maju (developed region) dan wilayah relatif terbelakang (underdeveloped region) dalam proses pembangunan di daerah (Utomo, 2022). Ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat atas output (barang atau jasa). Daya beli masyarakat yang rendah, maka akan menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang terjadi memberi dampak terhadap upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar pulau atau wilayah dimasa datang (Rahmadi and Parmadi, 2019).

Masalah ketimpangan di Indonesia masih menjadi persoalan penting di tengah-tengah masyarakat itu. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia menyentuh jumlah 271,4 juta jiwa yang sayangnya peningkatan jumlah penduduk tidak diikuti dengan penurunan ketimpangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menjadikan pertambahan jumlah penduduk menjadi permasalahan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan (Puteri, 2022). Permasalahan ketimpangan ini akan membawa akibat timbulnya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan antar provinsi yang ada di Indonesia sangat dirasakan sampai saat ini, terutama antara Pulau Jawa dan pulau-pulau diluar Pulau Jawa.

Secara nasional pulau sumatera menempati peringkat kedua setelah pulau jawa dengan rata-rata ideks gini periode 2018-2022 mencapai 0,3179. Hal tersebut menjadi perhatian khusus mengingat provinsi di Pulau Sumatera memiliki karakteristik dan banyak perbedaan di dalamnya. perbedaan tersebut tercipta dari keragaman provinsi di Pulau Sumatera, hal ini mengacu pada Pulau Sumatera adalah pulau dengan provinsi terbanyak yang mana perbedaan karakteristik semakin variatif pada Pulau Sumatera

dibandingka pulau besar lainnya. Perbedaan seperti ini dapat menjadi penghambat dalam pemerataan pembangunan karena terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di beberapa provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam seperti ini seharusnya dapat menjadi nilai tambah dalam pembangunan ekonomi dan dapat memberikan efek menyebar (spread effect). Namun pada kenyataannya kekayaan alam ini tidak dimiliki setiap provinsi secara merata (Andhiani, Erfit and Bhakti, 2018). Hal inilah yang dapat menyebabkan ketimpangan pada setiap provinsi. Berkembangnya provinsi-provinsi sejak tahun 2000-an di Pulau Sumatera dan desentralisasi juga berdampak mendorong ketimpangan antar provinsi menjadi lebih luas. Oleh karena itu, dengan melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi masing- masing provinsi yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi tidak merata dalam hal pendapatan.

Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan seperti indeks pembangunan manusia, PDRB, kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan inflasi (Puteri, 2022). Permasalahan tersebut mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ditinjau dari tingginya tingkat pengangguran terbuka di beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan didukung oleh tingginya fluktuasi gini ratio yang menyatakan ketimpangan di beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Begitu pula dengan perbedaan IPM yang menonjol di beberapa wilayah dibanding beberapa wilayah lainnya. Serta tingginya tingkat inflasi di Pulau Sumatera, hal menyebabkan permasalahan ekonomi dan perbedaan distribusi pendapatan yang menuju ketimpangan banyak terjadi di beberapa Provinsi di Pulau Sumatera.

## METODE

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yaitu data terdiri dari dua bagian yaitu : time series dan cross section. Data time series adalah data tahunan yang dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan cross section adalah sebanyak 10 Provinsi yang ada di Sumatera, yang diperoleh dari instansi-instansi pemerintah dan dari situs-situs internet yang telah diolah lebih lanjut. Dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif. Untuk mengetahui pengaruh dari PDRB per kapita, IPM, jumlah penduduk, inflasi, dan indek pembangunan TIK terhadap indeks gini ratio digunakan analisis regresi data panel dengan rumus sebagai berikut :

$$Gini_{it} = a + \beta_1 \text{LogPDRB}_{it} + \beta_2 \text{LogPop}_{it} + \beta_3 \text{Inflasi}_{it} + \beta_4 \text{IPM}_{it} + \beta_5 \text{IPTIK}_{it} + u_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

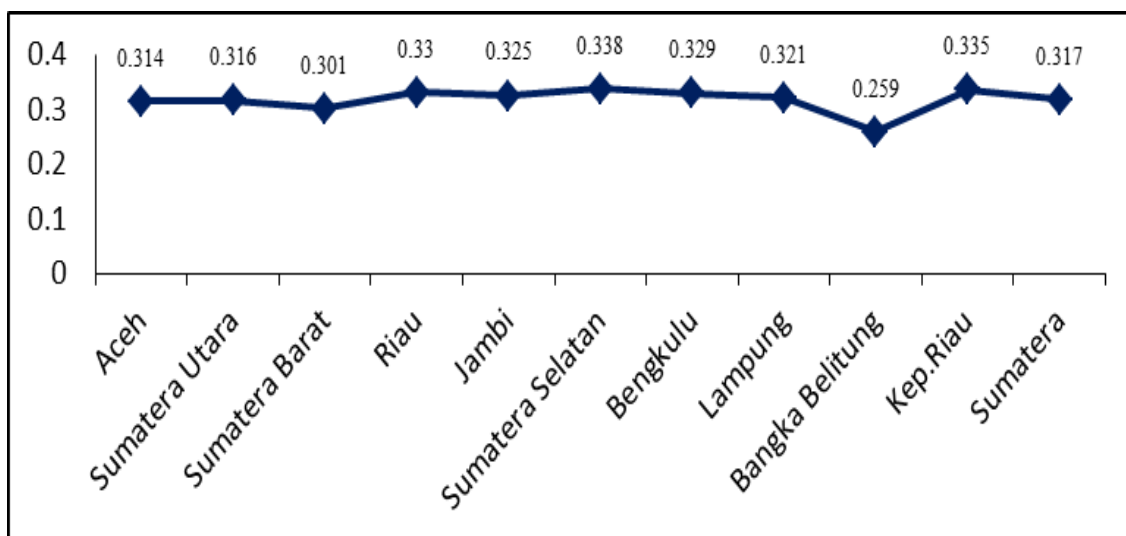
- $Gini_{it}$  : Gini Ratio
- $a$  : intersep
- $PRDB_{it}$  : PDRB
- $Pop_{it}$  : Populasi
- $Inflasi_{it}$  : Tingkat Inflasi
- $IPM_{it}$  : Indeks Pembangunan Manusia
- $IPTIK_{it}$  : Indeks Pembangunan TIK
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6$  : Koefisien Regresi
- $u_{it}$  : komponen error
- $i$  : dimensi cross section (1, 2, ..., N)
- $t$  : dimensi time series (1, 2, ..., T)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera

Di Pulau Sumatera, ketimpangan pendapatan menjadi fenomena yang menarik untuk dipelajari karena pulau ini memiliki beragam kondisi ekonomi, sosial, dan geografis yang berpengaruh pada distribusi kekayaan. Secara umum, terdapat perbedaan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan yang tidak. Di kota-kota besar seperti Medan, Palembang, dan Padang, terdapat konsentrasi ekonomi yang kuat, dengan adanya peluang kerja yang lebih banyak dan akses terhadap infrastruktur dan layanan yang lebih baik. Hal ini cenderung menyebabkan ketimpangan pendapatan antara kota dan desa, di mana pendapatan penduduk perkotaan cenderung lebih tinggi daripada penduduk pedesaan.

Selain itu, perbedaan dalam sektor ekonomi juga berperan dalam dinamika ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Daerah-daerah yang bergantung pada sektor pertanian atau perkebunan, seperti di daerah Sumatera Utara atau Riau, mungkin mengalami ketimpangan pendapatan antara petani kecil dan pemilik perkebunan besar. Namun dinamika ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera tidaklah tetap, dan dapat berubah seiring waktu dengan adanya perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan perlu memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika ekonomi di berbagai wilayah Pulau Sumatera, serta memperkuat akses terhadap kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.



**Gambar 1.** Rata-rata Gini Ratio Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2018-2022  
*Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah), 2024*

Gambar 1 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di setiap provinsi Pulau Sumatera berbeda. Selama periode 2018-2022, Gini Ratio di Pulau Sumatera dari tahun 2018 terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 selama dengan rata-rata gini ratio selama periode tahun 2018-2022 sebesar 0,317. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi di tingkat individu, di mana beberapa orang atau kelompok mendapatkan pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, atau di tingkat wilayah, di mana ada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi antar daerah. Ketimpangan pendapatan yang mengalami penurunan di Pulau Sumatera dapat diartikan bahwa pemerintah di setiap provinsi Pulau

Sumatera telah berhasil melakukan kebijakan dalam menurunkan angka ketimpangan pendapatan.

Selama periode tahun 2018-2022 terdapat empat provinsi yang memiliki nilai rata-rata gini ratio dibawah nilai rata-rata gini ratio Pulau Sumatera, keempat provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Kepulauan Bangka Belitung. Nilai rata-rata gini ratio di Provinsi Aceh yaitu sebesar 0,314, nilai rata-rata gini ratio di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,316, Nilai rata-rata gini ratio di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,301, nilai rata-rata gini ratio di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,259. Sedangkan tiga provinsi di Sumatera yang memiliki nilai Gini ratio di atas rata-rata, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Nilai rata-rata gini ratio di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,338, Nilai Gini ratio yang tinggi di Provinsi Bengkulu sebesar 0,329 dan Angka Gini ratio yang tinggi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,335.

Jika melihat secara keseluruhan, hanya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami penurunan nilai Gini ratio setiap tahun dalam periode 2018-2022. Ini menunjukkan bahwa Provinsi lain di Sumatera masih menghadapi masalah serius terkait ketimpangan pendapatan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah masing-masing. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Provinsi-provinsi di Sumatera belum mencapai hasil yang memuaskan.

### Pemilihan model regresi terbaik

Dalam menentukan model estimasi regresi data panel yang terbaik dilakukan dengan beberapa tahap pengujian yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Adapun hasil regresi pengujian model data panel seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1.

**Tabel 1.** Hasil pengujian model data panel terbaik

Model	Probability	Kesimpulan
Uji Chow	0,0000	< 0,05 Model terbaik Fixed Effect Model (FEM)
Uji Hausman	0,5207	> 0,05 Model terbaik Random Effect Model (REM)
Uji Lagrange Multiplier	0,0000	< 0,05 Model terbaik Random Effect Model (REM)

*Sumber: Data diolah, 2024*

Berdasarkan Tabel 1 merupakan hasil pengujian model data panel terbaik dengan penjelasan sebagai berikut :

#### Uji Chow

Berdasarkan hasil Uji Chow yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi Prob cross section Chi-square yaitu  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

#### Uji Hausman

Berdasarkan hasil Uji Hausman yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi Prob Cross-section random yaitu sebesar  $0,5207 > 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, sehingga model terbaik yang dipilih adalah Random Effect Model (REM).

**Uji lagrange multiplier**

Hasil Uji Lagrange Multiplier yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas Both Breush-Pagan sebesar  $0,0000 < 0,05$  sehingga model terbaik yang digunakan adalah Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil dari tiga tahapan pengujian maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik estimasi data panel pada penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).

**Interpretasi regresi data panel dengan metode FEM**

Berdasarkan hasil Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier, model yang sering muncul adalah model REM, adapun hasil pengolahan data panel metode REM dengan bantuan Eviews seperti yang ditunjukkan pada oleh Tabel 2.

**Tabel 2.** Hasil regresi data panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,190820	0,369384	0,516589	0,6080
PDRB	0,004723	0,001859	2,540745	0,0147
POP	0,010300	0,012055	0,854474	0,3975
INF	-0,000458	0,000804	-0,569968	0,5716
IPM	-0,000518	0,004454	-0,116328	0,9079
IPTIK	-0,013910	0,005842	-2,381156	0,0217

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil regresi data panel pada Tabel 2 dapat dilihat antara variabel independen terhadap variabel terikat tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Gini_{it} = 0,190820 + 0,004723LogPDRB_{it} + 0,010300LogPop_{it} - 0,000458Inflasi_{it} - 0,000518 \beta 4IPM_{it} - 0,013910 IPTIK_{it} + \mu_{it} \dots\dots\dots(2)$$

Nilai konstanta sebesar 0,190820 yang artinya jika diasumsikan PDRB, populasi, inflasi, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan TIK bernilai tetap atau konstan maka ketimpangan pendapatan akan bernilai sebesar 0,190820.

Nilai koefisien regresi variabel PDRB sebesar 0,004723 dan menjelaskan pengaruh positif PDRB terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika PDRB mengalami kenaikan setiap 1% maka akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan sebesar 0,004723 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap atau konstan.

Nilai koefisien regresi variabel populasi sebesar 0,010300 dan menjelaskan pengaruh positif populasi terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika populasi mengalami kenaikan setiap 1% maka akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan sebesar 0,010300 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap atau konstan.

Nilai koefisien regresi variabel inflasi sebesar 0,000458 dan menjelaskan pengaruh negatif inflasi terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika inflasi mengalami penurunan setiap 1% maka akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan sebesar 0,000458 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap atau konstan.

Nilai koefisien regresi variabel indeks pembangunan manusia sebesar 0,000518 dan menjelaskan pengaruh negative indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika indeks pembangunan manusia mengalami penurunan setiap 1% maka akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan sebesar 0,000518 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap atau konstan.

Nilai koefisien regresi variabel indeks pembangunan TIK sebesar 0,013910 dan

menjelaskan pengaruh negative indeks pembangunan TIK terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika indeks pembangunan TIK mengalami penurunan setiap 1% maka akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan sebesar 0,013910 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap atau konstan.

### Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis, terdapat dua tahapan yaitu uji F dan uji, selanjutnya setelah dilakukan dua tahapan tersebut, dilakukan pengujian koefisien determinasi seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 3.

**Tabel 3.** Hasil uji hipotesis

Uji F	Prob (F-statistic)	0,000280
Uji t	Prob. PDRB Prob. Populasi	0,0147
	Inflasi Prob. IPM Prob. IPTIK	0,3975
		0,5716
		0,9079
		0,0217
Koefisien Determinasi	R-Squared (R2)	0,402906

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan koefisien determinasi (R2) pada Tabel 3 dapat diuraikan sebagai berikut :

### Uji F

Hasil Uji F yang menunjukkan bahwa nilai Prob(F-Statistic) sebesar  $0,000280 < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya semua variabel independen yaitu PDRB, Populasi, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan TIK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

### Uji t

Berdasarkan hasil analisis, variabel PDRB menunjukkan nilai probabilitas (t-statistic) yang lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,0147 < 0,05$ ) dan nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel ( $2,540745 > 2,005$ ), yang berarti variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Di sisi lain, variabel Populasi memiliki nilai probabilitas (t-statistic) yang lebih besar dari taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,3975 > 0,05$ ) dan nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel ( $0,854474 < 2,005$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Populasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Begitu pula dengan variabel Inflasi yang memiliki nilai probabilitas (t-statistic) lebih besar dari taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,5716 > 0,05$ ) dan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ( $0,569968 < 2,005$ ), yang mengindikasikan bahwa variabel Inflasi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Selain itu, variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan nilai probabilitas (t-statistic) lebih besar dari taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,9079 > 0,05$ ) dan nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel ( $0,116328 < 2,005$ ), yang berarti variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Namun, variabel Indeks Pembangunan TIK menunjukkan hasil yang berbeda, di mana nilai probabilitas (t-statistic) lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,0217 < 0,05$ ) dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,381156 > 2,005$ ), yang menyimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan TIK

berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

### **Koefisien determinasi**

Berdasarkan hasil regresi data panel metode FEM yang menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi pada R-Squared sebesar 0,402906 atau sebesar 40%. Artinya PDRB, populasi, inflasi, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan TIK mampu menjelaskan dengan baik terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 40% sedangkan 60% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan**

Dapat disimpulkan setelah pengujian dengan menggunakan regresi data panel adalah PDRB memperoleh nilai koefisien sebesar 0,004723 dan nilai probabilitas sebesar  $0,0147 > 0,05$  dengan demikian PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 2018-2022. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2017) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. PDRB yang tinggi dalam suatu wilayah seringkali berdampak positif karena adanya perbedaan di antara individu-individu atau kelompo-kelompok di dalam masyarakat.

### **Pengaruh populasi terhadap ketimpangan pendapatan**

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa populasi memiliki nilai koefisien sebesar 0,010300 dan nilai probabilitas sebesar  $0,3975 > 0,05$  kesimpulannya yaitu populasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 2018-2022. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rohifuddin (2018) peningkatan yang terjadi pada jumlah penduduk tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan ketimpangan pendapatan karena masing-masing daerah atau wilayah masih mampu menampung pertumbuhan populasi.

### **Pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan**

Nilai koefisien dari variabel inflasi sebesar 0,000458 dan nilai probabilitasnya sebesar  $0,5716 > 0$ , maka inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 2018-2022. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Pramesti and Yasa (2019) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara inflasi dengan ketimpangan pendapatan yang apabila inflasi meningkat ketimpangan pendapatan cenderung menurun hingga mencapai titik terendahnya, sebelum kemudian kembali meningkat. Inflasi cenderung memiliki dampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan karena meingkatkan biaya hidup bagi semua orang, tetapi dampaknya tidak merata diseluruh lapisan masyarakat.

### **Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan**

Indeks pembangunan manusia memiliki nilai koefisien sebesar 0,000518 dan nilai probabilitas sebesar  $0,9079 > 0,05$  sehingga indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 2018-2022. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arafah and Khoirudin,(2022) yang menjelaskan IPM cenderung tidak memperhitungkan ketimpangan pendapatan secara langsung dalam perhitungannya. IPM lebih fokus pada aspek-aspek kesejahteraan manusia secara keseluruhan dan tidak



selalu mempertimbangkan distribusi pendapatan di antara populasi. Sebagai hasilnya, meskipun IPM meningkat, ketimpangan pendapatan masih bisa bertahan atau bahkan meningkat karena IPM tidak memperhitungkan perbedaan pendapatan yang signifikan di antara individu-individu dalam masyarakat.

### **Pengaruh indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi terhadap ketimpangan pendapatan**

Nilai koefisien indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi sebesar 0,013910 dan nilai probabilitas sebesar  $0,0217 > 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 2018-2022. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2022) yang menyatakan bahwa adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks ekonomi sering kali memunculkan pola-pola baru dalam pembagian tenaga kerja. Meskipun TIK dapat menciptakan peluang pekerjaan baru, seperti di sektor teknologi atau e-commerce, namun pekerjaan-pekerjaan ini seringkali membutuhkan keterampilan teknis dan pendidikan yang tinggi. Sebagai hasilnya, individu-individu dengan keterampilan dan pendidikan yang lebih rendah mungkin tertinggal dalam perubahan ini, meningkatkan ketimpangan pendapatan antara mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan mereka yang tidak mampu beradaptasi pada perubahan TIK.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Nilai rata-rata gini ratio di Sumatera sebesar 0,317 dengan rata-rata perkembangan -0,41% termasuk kedalam ketimpangan pendapatan sedang. Nilai rata-rata gini ratio terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,259. termasuk kedalam ketimpangan pendapatan rendah dan Nilai rata-rata gini ratio tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,338. Provinsi lain di Sumatera masih menghadapi masalah serius terkait ketimpangan pendapatan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Provinsi-provinsi di Sumatera belum mencapai hasil yang memuaskan.

Berdasarkan hasil regresi data panel, secara simultan variabel PDRB, populasi, inflasi, indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera. Secara parsial, variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, variabel populasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, variabel inflasi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan serta variabel indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait pada penelitian ini yaitu pertama untuk pemerintah agar terus berupaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang terjadi dimasyarakat melalui kebijakan-kebijakan seperti meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur di setiap wilayah pulau sumatera baik jalan, listrik, dan akses telekomunikasi yang

memungkinkan masyarakat dapat memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih luas. Pemerintah juga perlu mendorong pengembangan sektor ekonomi local yang berbasis pada keunggulan tiap wilayah yang diharapkan dapat menciptakan lapangan tenaga kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian terkait ketimpangan pendapatan disarankan untuk mencari indikator lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan kemudian menambah jumlah periode tahun dan wilayah penelitian dan menganjurkan untuk menggunakan metode penelitian terbaru supaya dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, I. F., & et al. (2020). Analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur. *Ideas Publishing*, 1(1).
- Alin, N. F., Heriberta, H., & Umiyati, E. (2019). Fakta empiris kurva U-terbalik Kuznets mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1). <https://doi.org/10.22437/Paradigma.V14i1.6788>
- Andhiani, K. D., Erfit, E., & Bhakti, A. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 26–34. <https://doi.org/10.22437/Pdpd.V7i1.4602>
- Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2).
- Arifin, Z. (2019). Memahami PDRB sebagai instrumen untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di daerah. *Bappeda Jambi* [Preprint].
- B.P.S. (2021). Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Bangka Belitung.
- Dainty Julliet Roring, G., Kumenaung, A. G., & Ch P Lopian, A. L. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4 kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(4).
- Damanik, A. M., Zulgani, & Rosmeli. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1). <https://doi.org/10.22437/Pdpd.V7i1.4533>
- Dewi, D. M., & et al. (2022). Kontribusi teknologi informasi dan komunikasi terhadap kelompok ketimpangan pendapatan daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(2).
- Ersad, M., Amir, A., & Zulgani. (2022). Dampak IPM, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2). <https://doi.org/10.22437/Jpe.V17i2.15614>
- Fachruurrozi, M., & Hasmarini, I. (2023). Analisis determinan ketimpangan pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(1).
- Fuady, A. (2018). Teknologi digital dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1).
- Gujarati, D. (2004). *Basic Econometrics* (4th ed.). McGraw-Hill Inc.
- Harahap, F. S., Erlina, & Rujiman. (2020). Analisis determinan disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. *Serambi Engineering*, 5(2).
- Harahap, S., Harahap, D., & Matondang, Z. (2022). Determinan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara. *Profjes: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Hardani, & et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (1st ed.). Edited by A. Husnu Abadi, A. Md. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB per kapita, investasi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi DIY tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 6(6).
- Hartoto, & As'ari, H. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, (4), 4.
- Heinrich, T., Yang, J., & Dai, S. (2021). Growth, development, and structural change at the firm-level: The example of the PR China. *21ssrn Electronic Journal*, 16(5).

- <https://doi.org/10.2139/ssrn.3756558>
- Hindun, H. S. A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 8(3). <https://doi.org/10.26418/Jebik.V8i3.34721>
- Jannah, M. (2022). Analisis pengaruh tingkat PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 2019-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4). <https://doi.org/10.58192/Profit.V1i4.183>
- Juniati, W., Abdullah, M. L., & Wibowo, M. G. (2022). Determinants of income inequality villages and cities in Indonesia. *Journal of Developing Economies*, 7(2). <https://doi.org/10.20473/Jde.V7i2.33980>
- Kemenkeu. (2021). Kajian fiskal regional.
- Khazanah. (2014). Rumus menghitung jumlah penduduk. Bukit Tinggi: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi.
- Kurniawan, A. E. (2016). *Model regresi data panel berganda*. Universitas Indonesia.
- Kuznets, S. (1995). Economic growth and income inequality. *American Economic Association*.
- Lala, A. J., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2023). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat ketimpangan pendapatan (Studi pada kota-kota Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1).
- Marantika, D., P, T. H., & Viphindartin, S. (2018). Disparitas regional antar provinsi di Indonesia tahun 2011-2015 (Model regresi spasial). *Media Trend*, 13(1).
- Mardhian, D., Yulianita, A., & Mukhlis, M. (2023). Ketimpangan dan prospek perekonomian di Pulau Sumatera. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5. <https://doi.org/10.37034/Infec.V5i3.612>
- Mu'awwanah, U., & Illah, G. R. R. (2022). Problematika kependudukan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1).
- Nasution, M. (2020). Inequality between regions & their relationship with government expenditures: A study in Indonesia. *Marihot Nasution*, 5(2), 2020.
- Negara, R. (2012). Analisis pengaruh kondisi inflasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang. *Universitas Padjadjaran*.
- Olupona, T. (2018). The impact of education on income inequality. *SSRN [Preprint]*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3485523>
- Perwiraningsih, J. P. (2020). Gambaran risiko stres kerja pada guru kelas 6 SD Negeri se-Kecamatan Banyuwangi. *Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh (Makma)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.32672/Makma.V3i1.1483>
- Pramesti, D. A. D. G., & Yasa, I. N. M. (2019). Pengaruh investasi dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(11).
- Pratama, R., & Sahnun, M. (2019). Analisis ketimpangan distribusi pendapatan pedagang di Kecamatan Tanjung Morawa-Deli Serdang. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.30743/V1i1.1403>
- Puteri, A. C. (2022a). Analisis determinan ketimpangan pendapatan 33 provinsi di Indonesia tahun 2010-2020. *Universitas Islam Indonesia*.
- Puteri, A. C. (2022b). Analisis determinan ketimpangan pendapatan 33 provinsi di Indonesia tahun 2010-2020. *Universitas Islam Indonesia*.
- Raharti, R., Laras, T., & Oktavianti, O. (2021). Model ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2). <https://doi.org/10.33059/Jseb.V12i2.2422>
- Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(2). <https://doi.org/10.22437/Paradigma.V14i2.6948>
- Rahman, R., & Putri, D. Z. (2021). Analisis pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(3).

- Rambey, M. J. (2018). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 4(1), 32–36.
- Riandi, M., & et al. (2020). Pengaruh kemiskinan dan upah minimum provinsi. *Statistik Indonesia* (2018), 57–68.
- Rinjani, M. F. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2010-2016. *Angewandte Chemie International Edition*, 3(2).
- Riyanti, A., & Karimi, K. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat. *Bung Hatta* [Preprint].
- Rohifuddin, M. (2018). Income inequality in Indonesia: Panel data of 34 provinces 2014-2016.
- Salim, A., & Fadilla, (2021). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1).
- S. Rahmadi, D. Hastuti. (2023). Peran pengelolaan pasar dalam meningkatkan pendapatan pedagang pasar rakyat Aur Duri. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 29-36.
- S. Rahmadi, D. Hastuti, P. Parmadi, H. Parkhurst. (2024). Studi komparatif faktor penentu kemiskinan provinsi di Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(1), 96-113.
- Simarmata, Y. P. H., & Sinaga, M. (2023). Analisis pengaruh kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM di Indonesia. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Sosial, and Arts (LWSA)*, 5(2). <https://doi.org/10.32734/Lwsa.V6i1.1679>
- Smeru. (2019). Buletin Smeru.
- Todaro, M. P., & Smith, S. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education.
- Topuz, S. G. (2022). The relationship between income inequality and economic growth: Are transmission channels effective? *Social Indicators Research*, Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/S11205-022-02882-0>
- Utomo, T. N. Y. P. (2022). Pertumbuhan berpendidikan SMA ke atas, dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali tahun 2016-. 5.
- Valentine, E. R. (2023). Determinan ketimpangan pendapatan pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur, dan Luwu Utara.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2020). Produk domestik regional bruto. *Angewandte Chemie International Edition*.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonisia Fe Uii.
- Windriyanti, D. L. (2019). Pengaruh PDRB per kapita, jumlah penduduk, inflasi dan kebijakan dana desa terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi di Yogyakarta. *Universitas Negeri Semarang*.
- World Bank. (2016). Ketimpangan yang semakin lebar.
- Yeniwati, (2013). Ketimpangan ekonomi antar provinsi di Sumatera. *Kajian Ekonomi*, 2(3).
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1). <https://journal.uui.ac.id/jkek/article/view/25221/13990>
- Zachary, K. A. (2024). Peran investasi langsung domestik dan asing, kemajuan teknologi, serta PDRB per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.